

ABSTRAK

Salah Satu permasalahan yang sering muncul ketika melakukan eksekusi hak tanggungan yaitu salah satunya adalah adanya gugatan dari pihak nasabah maupun pihak ketiga sekalipun. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang dilakukan sendiri oleh pemegang hak tanggungan sering dipermasalahkan dan dijadikan tameng untuk melakukan penundaan lelang. Tentu hal demikian sangat merugikan bagi pihak pemegang hak tanggungan dimana tidak dapat melaksanakan hak nya sebagai pemegang hak tanggungan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan Pasal 6. Permasalahan dalam skripsi ini mengenai tertundanya pelaksanaan penjualan jaminan secara langsung yang dikarenakan adanya pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan sengketa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank BNI Syariah terhadap nasabahnya yang macet berdasarkan Putusan Nomor 1316/PDT.G/2016/PA.TMK. Penulisan skripsi menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menghasilkan data deskriptif yang merupakan kesimpulan skripsi ini, mengenai eksekusi hak tanggungan melalui pengadilan atau eksekusi langsung akibat dari adanya *wanprestasi* di PT Bank BNI Syariah. Eksekusi hak tanggungan dapat terlaksana apabila bukti kepemilikan atas suatu hak atas tanah tersebut telah sah secara hukum dilakukan pembebanan hak tanggungan peringkat pertama yang dibuktikan dengan terbitnya dokumen hukum berupa sertipikat hak tanggungan. Di dalam pertimbangannya majelis hakim tersebut berpendapat bahwa pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut tidak dapat serta merta dilakukan melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu dengan demikian pelaksanaan eksekusi hak tanggungan harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan terlebih dahulu.